

RENCANA KERJA PERUBAHAN



2025

**BIRO HUKUM SETDA
PROV SULTENG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen **Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Perubahan Renja Biro Hukum Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya perubahan alokasi anggaran sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur Biro Hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan **Rencana Kerja Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025**. Dengan demikian, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat terus dijaga, serta target kinerja yang telah ditetapkan dapat lebih optimal diwujudkan.

Palu, 15 September 2025

Kepala Biro Hukum

ADIMAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740610 200003 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Hukum	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	4
2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Renja Awal s/d TW II	7
2.3 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan.....	10
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	11
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional... ..	11
3.2 Penentuan Isu Isu Strategis.....	12
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan.....	13
Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
Bab V Penutup	15

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam proses perencanaan, pemerintah daerah harus selaras dengan pemerintah pusat dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Alur, proses dan dokumen tercakup antara lain tata cara penyusunan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang meliputi dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja.

Renja sendiri adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen resmi, Renja menjadi acuan penting dalam mengarahkan program dan kegiatan perangkat daerah, khususnya, serta pembangunan daerah secara umum.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2025 Biro Hukum ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Biro Hukum. Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2025 menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja tidak hanya mencakup Langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Menteri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengefektifkan serta mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan Perencanaan Anggaran secara terpadu, sinergi dan terkoordinasi dengan baik di Biro Hukum.
2. Sebagai pedoman bagi penyusunan program kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025
3. Mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada optimalisasi pencapaian hasil (Outcomes).

Sementara tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan;
2. Terwujudnya ketertarikan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO HUKUM

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Hukum Tahun 2024, identifikasi faktor-faktor pendukung ataupun kendala yang terjadi, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Kinerja Biro Hukum Tahun Lalu

1	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024				
	2			Pagu Awal			Pagu Perubahan							
	1			3			4			5			6	
			Indikator	Satuan	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp		
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Nilai	88,50	100	2.026.894.100	88,50	100	2.684.615.700	100	2.514.493.209	
2		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	100	100	12.400.000	100	100	14.605.000	100	14.605.000		
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	100	12.400.000	7	100	14.605.000	7	14.605.000		
4		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	629.240.000	100	100	593.400.000	100	584.796.000		
5		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	4	100	629.240.000	4	100	593.400.000	4	584.796.000		
6		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	314.087.500	100	100	384.487.710	100	364.953.850		
7		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100	29.500.000	1	100	29.390.160	1	29.200.000		
8		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Paket	-	-	-	-	-	-	-	-		
9		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	100	199.787.500	45	100	303.897.550	425	288.388.750		
10		Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	100	84.800.000	3	100	51.200.000	4	47.365.100		

11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	721.911.200	100	100	1.265.097.590	100	1.151.420.150
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	100	277.944.850	4	100	340.967.240	4	338.147.450
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	100	41.974.350	2	100	52.010.350	2	51.999.500
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	100	401.992.000	3	100	872.120.000	3	761.273.200
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	40.240.000	100	100	23.320.000	100	23.320.000
16	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	100	40.240.000	1	100	23.320.000	1	23.320.000
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	176.015.400	100	100	270.705.400	100	256.405.000
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	100	176.015.400	4	100	270.705.400	4	256.405.000
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	133.000.000	100	100	133.000.000	100	118.993.209
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	100	100.000.000	25	100	100.000.000	25	87.508.209
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	100	33.000.000	25	100	33.000.000	25	31.485.000
22	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	INDEKS REFORMASI HUKUM	Nilai	60	100	2.573.105.900	60	100	2.495.384.300	100	2.374.806.922
23	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan	Laporan	4	100	1.096.180.400	4	100	1.384.171.300	4	1326934800
24	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Kepgub/ Raperda/ Pergub	297	100	532.180.400	297	100	638.491.400	516	607142100
25	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	5	100	189.000.000	5	100	215.879.000	5	204903500
26	Fasilitasi Dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Raperda/ Perkada	205	100	375.000.000	205	100	529.800.900	573	514889200
27	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Laporan	4	100	1.476.925.500	4	100	1.111.213.000	4	1047872122
28	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	kasus/ perkara	5	100	1.210.232.000	5	100	724.591.000	56	678522875
29	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	kasus/ perkara	5	100	266.693.500	5	100	386.622.000	21	369349247
Jumlah						4.600.000.000			5.180.000.000		4.889.300.131

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum, Prov Sulteng.

Secara umum, capaian kinerja Biro Hukum pada Tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan sebagian besar target tahunan berhasil direalisasikan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari keberhasilan fasilitasi dan koordinasi hukum, baik dalam penyusunan produk hukum daerah provinsi, penyusunan naskah hukum lainnya, maupun pendokumentasian dan diseminasi informasi hukum kepada masyarakat.

Pada aspek fasilitasi penyusunan produk hukum, target-target kinerja dapat tercapai dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas perumusan dan harmonisasi produk hukum, meskipun ketersediaan jabatan fungsional khusus, seperti analis hukum, belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja Biro Hukum tetap mampu optimal meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia fungsional yang ideal. Dalam hal pengelolaan dokumentasi dan naskah hukum lainnya, kegiatan telah terlaksana sesuai target. Namun, perlu dicatat bahwa pengelolaan informasi sempat menghadapi kendala teknis akibat sistem yang sedang dalam tahap pembaruan. Meskipun demikian, langkah adaptasi yang dilakukan mampu menjaga kelancaran pelayanan, sehingga target tetap dapat terpenuhi sesuai jadwal.

Pada fasilitasi bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, capaian kinerja juga melampaui target yang telah ditentukan. Bahkan, pada beberapa kasus perkara yang masuk, jumlahnya melebihi target awal. Hal ini menegaskan bahwa peran Biro Hukum semakin strategis dalam memberikan perlindungan hukum, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan akses bantuan hukum. Dari sisi penunjang urusan pemerintahan daerah, berbagai kegiatan administratif, pengelolaan keuangan, kepegawaian, hingga penyediaan sarana prasarana dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas tata kelola internal yang mendukung pencapaian kinerja utama Biro Hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Hukum pada Tahun 2024 menunjukkan arah perkembangan yang positif, ditandai dengan tercapainya sebagian besar indikator kinerja sesuai target. Kendala yang muncul, baik terkait keterbatasan jabatan fungsional maupun pembaruan sistem pengelolaan informasi hukum, mampu diantisipasi melalui langkah adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, Biro Hukum tetap berada pada jalur yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Renja Awal s/d TW II

Pada awal tahun anggaran 2025 yang sedang berlangsung, pelaksanaan Renja OPD telah diarahkan untuk mencapai target yang sebagaimana telah dituangkan pada RKPD murni. Secara umum, jalannya kinerja masih terealisasi sampai dengan pertengahan tahun dengan capaian yang baik dan sesuai. Akan tetapi, diketahui terdapat beberapa perubahan akibat seperti efisiensi anggaran dan keputusan dari pemerintah pusat dalam sub kegiatan hak asasi manusia (HAM), yang memengaruhi tindak reconfiguring untuk kesesuaian kegiatan yang lebih efektif.

Kondisi ini mengakibatkan perlunya penyesuaian target dan alokasi anggaran melalui penyusunan Renja Perubahan, agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Sejalan dengan uraian tersebut, berikut disajikan tabel ringkasan capaian kinerja dan anggaran sebelum perubahan:

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025 s/d TW II

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	3 Indikator	Target RPJSD Provinsi Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja OPJWD		Target Kinerja dan Anggaran APBD		Target Kinerja dan Anggaran APBD	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada TRIWULAN I				Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada TRIWULAN II	
			Satuan	K	4 Rp	K	5 Rp	K	6 Rp	K	7 Rp	K(%)	8 Rp	K(%)	9 Rp	
1	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KEPUKASAT	Nilai	90	1.563.234.300	88,50	2.518.498.509	90	1.563.244.300	90	1.069.940.600	16,49	176.449.500	27,44	293.620.640	
2	Kegiatan : Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	100%	18.600.000	100	18.610.000	100	18.610.000	100	7.050.000	0,00	-	92,91	6.550.000	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	18.600.000	7	14.609.000	5	18.610.000	1	7.050.000	0,00		92,91	6.350.000	
4	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100%	472.590.000	100	564.796.000	100	472.590.000	100	527.130.000	26,83	141.454.500	18,16	95.751.000	
5	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	472.590.000	4	264.796.000	1%	472.590.000	1	527.130.000	26,83	141.454.500	18,16	95.751.000	
6	Kegiatan : Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perangkat Daerah	Persentase	100%	157.365.811	100	364.953.850	100	157.365.811	100	54.418.511	0,00	-	0,00	-	
7	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakatan Dana dan Aktivitas Kelangkaannya	Jumlah Paket Pakatan Dana Kelangkaannya	Paket	1	41.618.511	1	29.200.000	1	41.618.511	1	41.618.511	0,00		0,00		
8	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	105	102.947.300	425	288.388.750	105	102.947.300	0	-					
9	Sub Kegiatan : Biotek Implementasi Peraturan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan-Undangan	Orang	1	12.800.000	4	47.365.100	1	12.800.000	1	12.800.000	0,00		0,00		
10	Kegiatan : Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Persentase	100%	448.233.589	100	1.151.420.450	100	448.233.589	100	261.982.089	0,00	-	48,44	126.912.566	
11	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Kantor	Jumlah Paket Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Kantor yang Diadakan	Paket	2	97.179.539	4	338.147.450	5	97.179.539	2	50.578.039	0,00		84,78	42.712.966	
12	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang	Paket	2	44.544.050	2	51.999.500	2	44.544.050	2	31.769.050	0,00		53,20	16.899.800	
13	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD	Laporan	3	306.510.000	3	761.273.500	3	306.510.000	3	179.835.000	0,00		37,42	67.299.800	
14	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	Persentase	100%	90.096.800	100	23.320.000	100	90.096.800	100	-		-		-	

15	Sub Kegiatan : Pengadaan Meubelur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	90.096.800	1	23.320.000	1	90.096.800	0	-	-	-	-	-
16	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	119.578.100	100	256.405.000	100	119.578.100	100	-	-	-	-	-
17	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Perawatan dan Perangkapan Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perangkapan Kantor yang	Laporan	1	119.578.100	4	256.405.000	5	119.578.100	0	-	-	-	-	-
18	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	256.770.000	100	118.993.209	100	256.770.000	100	219.360.000	15,95	34.995.000	29,36	64.407.074
19	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Dipelaksana dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Unit	25	232.680.000	25	87.508.209	25	232.680.000	24	200.380.000	17,46	34.995.000	32,14	64.407.074
20	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	24.090.000	25	31.485.000	15	24.090.000	25	18.980.000	0,00	-	0,00	-
21	Program : PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	INDEKS REFORMASI HUKUM	Nilai	62	1.886.755.700	60	2.374.806.922	68	1.886.755.700	88	1.001.670.730	-	66.550.000	-	186.700.742
22	:	INDEKS KUALITAS KEBERAKAN	Nilai	-	-	-	-	60	1.886.755.700	55	-	-	-	-	-
23	Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitas dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan	Laporan	100%	894.998.700	4	1.326.934.800	4	894.998.700	100	488.914.730	12,08	59.050.000	11,41	55.799.500
24	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Diusun	Kepgub/ Raperda / Pergub	306	420.614.200	516	607.142.100	306	420.614.200	306	230.095.190	10,04	23.100.000	15,75	36.341.400
25	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukunya	Dokumen	5	160.384.500	5	204.903.500	5	160.384.500	5	86.229.600	28,99	25.000.000	17,03	14.683.100
26	Sub Kegiatan : Fasilitas Dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Raperda / Perkada	215	314.000.000	573	514.889.200	215	314.000.000	215	172.590.000	6,34	10.950.000	2,82	4.875.000
27	Kegiatan : Fasilitas Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Laporan	100	691.757.000	4	1.047.872.122	4	691.757.000	100	512.756.000	1,46	7.600.000	25,53	130.901.242
28	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyediaan Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Disediakan	kasus/ perkara	26	495.952.000	56	678.522.875	26	495.952.000	26	450.206.000	0,00	-	18,55	83.500.000
29	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyediaan Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang disediakan	kasus/ perkara	10	195.805.000	21	369.340.247	10	195.805.000	25	62.550.000	11,99	7.500.000	75,78	47.401.242

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun hasil kajian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum
 - a. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitas Bantuan Hukum
 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum
 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam analitik pemerintah daerah Sulawesi Tengah melihat kebijakan pemerintah pusat saat ini memang telah berada pada jalur yang benar dengan penekanan integrasi, digitalisasi, keterpaduan dan menekankan efisiensi. Untuk itu telah disesuaikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 untuk menjadi acuan dan bukti komitmen pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan pusat tersebut.

Dinamika pembangunan daerah di Sulawesi Tengah saat ini telah menyuguhkan hasil positif walaupun pelaksanaannya mengalami tantangan dalam penyesuaian anggaran sebagai respon kebijakan tersebut. Untuk itu dibentuklah dokumen ini sebagai interpretasi yang berkomitmen pada keselarasan dengan nilai akuntabilitas. Pembangunan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah menunjukkan progress capaian yang positif, yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Berdasarkan evaluasi juga mengungkapkan terdapat beberapa kendala yang perlu disesuaikan dan dibenahi, antara lain; laporan pemenuhan HAM belum dapat terpenuhi tahun ini dikarenakan terdapatnya kebijakan pusat yang menghambat pelaksanaannya di daerah; kebutuhan *legal drafter* yang saat ini sedang dalam proses pemenuhan; dan kebutuhan sarana yang belum memadai.

Kebijakan nasional mendorong kolaborasi yang lebih adaptif. Sesuai dengan itu, Biro Hukum bersama dengan kabupaten/kota maupun OPD di Sulawesi Tengah lainnya menjamin kesesuaian produk hukum, terpenuhinya hak asasi manusia (HAM) serta pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Melalui penyelarasan ini, diharapkan segala keluaran yang dilakukan oleh Biro Hukum dapat memberikan hasil maksimal dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi spesifik pada kendala kinerja layanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tugas dan fungsi kemudian diterjemahkan dalam point berikut, antara lain:

- ✓ Terhambatnya pemenuhan laporan HAM, berdasarkan kebijakan pusat di tahun ini;
- ✓ Pemenuhan *legal drafter* yang saat ini sedang dalam proses pemenuhan; dan
- ✓ Kebutuhan sarana yang belum memadai jumlah anggota baru.

Isu-isu ini telah dirumuskan dalam periode yang telah berlangsung dan perlu untuk diperhatikan dalam peningkatan penyelenggaraan Biro hukumn dalam pemerintahan daerah khususnya bidang hukum yang berkontribusi pada pembangunan daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada tahun 2025 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan 2 Program, 9 Kegiatan dengan 17 Sub Kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp.2.071.611.350,- dengan penjabaran sebagai berikut:

- ✓ Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum merupakan program teknis dengan 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan :
 - Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 telah disesuaikan dengan dokumen RPJMD 2025-2029. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Demokratis, Bersih, Inovatif dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	70,38	70,75	71,13	71,5	71,88
				Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	55	58	60	62	65	67
			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	89	90	91	92	93

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini ialah dokumen perubahan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas serta fungsi sesuai dengan penjabaran Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2028, Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta target dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Biro Hukum berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya serta bertanggungjawab.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum, seluruh aparatur Biro Hukum secara berjenjang wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

Palu, 15 September 2025

Kepala Biro Hukum

ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 200003 1 007